



DATA TAK VALID, SULITKAN PETUGAS Dinsos Upayakan Warga Terakses Jaminan

YOGYA (KR) - Penonaktifan ribuan warga Kota Yogyakarta Penerima Bantuan Iur (PBI) dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi persoalan. Terutama dari sisi validitas. Dinas Sosial (Dinsos) pun mengupayakan warga yang menjadi penduduk Kota Yogya tetap terakses jaminan.

Kepala Dinsos Kota Yogya Agus Sudrajat, menjelaskan pihaknya sudah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan

(Dinkes) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) untuk melakukan penelusuran data. "Data terakhir ada hampir dua ribu penduduk yang perlu kami susur secara manual karena tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," jelasnya, Rabu (28/8).

Dari data awal, terdapat 6.488 penduduk Kota Yogya yang dinonaktifkan sebagai penerima PBI JKN oleh pe-

merintah pusat. Setelah dilakukan verifikasi dengan Dindukcapil, diketahui hanya ada 2.825 peserta PBI yang dinyatakan masuk sebagai warga Kota Yogya. Dinsos Kota Yogya kemudian melakukan verifikasi data tersebut ke BPJS Kesehatan, dan diketahui sebanyak 1.748 warga belum memiliki jaminan kesehatan apapun.

Agus menjelaskan, 1.748 warga yang belum memiliki jaminan kesehatan itu lang-

sung dimasukkan dalam kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program Pemerintah Daerah Mendaftarkan Penduduk Daerah (PDPD).

"Kami langsung masukkan mereka sebagai peserta PDPD sehingga premi kepesertaan jaminan kesehatan nasional ditanggung oleh APBD Kota Yogya. Tapi masih ada data yang hampir dua ribu orang itu yang sekarang kami susur," tambahnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005